



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id



www.dkpp.go.id



dkpp_ri



medsosdkpp



@DKPP_RI



DKPP RI

RILIS DKPP

DKPP AKAN PERIKSA KPU

KABUPATEN BOJONEGORO PADA 8 MARET 2024

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 9-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (8/3/2024) pukul 09.00 WIB.

Pengadu dalam Perkara ini adalah Muhammad Hanafi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Fatkhur Rohman, Fatma Lestari, Robby Adi Perwira, Mustofirin, Muchamad Muchlisin, yang secara berurutan berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo, Moch. Zaenuri, Muhammad Muchid, Weni Andriani dan Lia Andriyani sebagai Teradu VI sampai X.

Teradu I sampai V didalilkan telah melakukan Pembatalan dan/atau Pencoretan Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro atas Nama Muhammad Hanafi. dari Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 9 yang dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor 1182/PL.01.4-SD/3522/2023. Kemudian untuk Teradu VI sampai X didalilkan karena telah mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor 352/PM.00.02/K.JI-04/12/2023 Tanggal 4 Desember 2023 perihal Saran dan Perbaikan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, sehingga berdampak kepada Teradu telah dicoret dari Daftar Calon Tetap yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 141 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari para pihak, baik Pengadu, Teradu, Saksi, maupun Pihak Terkait. Selain itu, Sekretaris DKPP juga menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

Sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.

“Bagi masyarakat yang ingin hadir atau wartawan yang ingin meliput, silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” terang David.

Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang ini juga akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook resmi DKPP.

“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkas David. [Rilis Humas DKPP]

Sekretaris DKPP,



Dr. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001